



Manajemen Sarana Prasarana di SD Inpres Umapura, Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor

Rahmad Nasir¹, Rahman M. Hering², Atik Rosanti³

^{1,2}STKIP Muhammadiyah Kalabahi, Indonesia

³Universitas Islam Al Ihya Kuningan, Indonesia

E-mail: rahmad@stkipmuhammadiyahkalabahi.id, rahman.hering@yahoo.com,
rosantiatik@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2021-11-15 Revised: 2021-11-28 Published: 2021-12-17 Keywords: <i>Management;</i> <i>Infrastructure;</i> <i>SD Inpres;</i> <i>Umapura.</i>	This research is about the management of infrastructure at SD Inpres Umapura which has the aim of knowing the quality of the stages of management of school infrastructure starting from planning, procurement, regulation, use and elimination. The subject of this research is the principal and the object of this research is the school infrastructure management system that has been happening so far. The source of this research data comes from observation and scrutiny of documents on the situation of school infrastructure and interviews with school principals. The results showed that the quality of planning at 73.6% was categorized as good enough, the quality of procurement was 75% (good enough), the quality of regulation at 66.66% was in the good enough category, the quality of use was 65.625% categorized as good enough and the quality of elimination was equal to 25% are categorized as not good. This study provides recommendations to make major changes at the phase of elimination, while minor changes to the stages of planning, procurement, regulation and use of school infrastructure.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2021-11-15 Direvisi: 2021-11-28 Dipublikasi: 2021-12-17 Kata kunci: <i>Manajemen;</i> <i>Sarana Prasarana;</i> <i>SD Inpres;</i> <i>Umapura.</i>	Penelitian ini tentang manajemen sarana prasarana di SD Inpres Umapura yang memiliki tujuan agar mengetahui mutu tahapan manajemen sarana prasarana sekolah dimulai perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan dan penghapusan. Subjek penelitian ini yakni kepala sekolah dan objek dari penelitian ini yaitu sistem manajemen sarana prasarana sekolah yang selama ini terjadi. Sumber data penelitian ini berasal dari observasi dan pencermatan dokumen terhadap situasi sarana prasarana sekolah serta wawancara terhadap kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu perencanaan sebesar 73,6% terkategori cukup baik, mutu pengadaan sebesar 75% (cukup baik), mutu pengaturan pada angka 66,66% dalam kategori cukup baik, mutu penggunaan yakni 65,625% terkategori cukup baik serta mutu penghapusan sebesar 25% yang dikategorikan tidak baik. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan besar pada tahapan penghapusan, sementara perubahan kecil pada tahapan perencanaan, pengadaan, pengaturan dan penggunaan sarana prasarana sekolah.

I. PENDAHULUAN

Pada pasal 31 ayat 1 sampai 5 UUD Tahun 1945 setidaknya memberikan gambaran bahwa negara harus melayani hak warga negaranya agar mendapatkan pendidikan (pasal 1), kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, negara mengupayakan sistem pendidikan nasional untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia serta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (pasal 3), prioritas anggaran pendidikan minimal 20% APBN/APBD dalam pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan (pasal 4), memajukan IPTEK dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa (pasal 5). Dengan mempe-

rhatikan secara seksama bunyi pasal 31 UUD 1945 di atas, maka peran negara sangat dibutuhkan dalam pemenuhan cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, Peran negara mendukung maksimal penyelenggaraan pendidikan dari standar 'nilai' hingga pada penyelenggaraan secara teknis operasional melalui perangkat negara yang ada (Irwansyah, 2021). Dalam wujud nyatanya adalah negara harus menyediakan pendanaan yang cukup untuk membiayai seluruh proses penyelenggaraan pendidikan yakni dalam rangka membiayai sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan gaji/ honor pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiayaan lainnya.

Masalah pendidikan setidaknya diklasifikasikan dalam masalah filsafat pendidikan (problem filosofis), teori pendidikan, kebijakan pendidikan, manajemen pendidikan dan teknis operasional. Untuk itulah seorang yang ditugaskan negara dalam mengurus pendidikan baik sebagai menteri pendidikan dan pejabat di bawahnya, kepala dinas pendidikan level propinsi, kepala dinas pendidikan level kabupaten, kepala sekolah dan struktur di bawahnya hingga pada guru-guru harus bisa memahami akar permasalahan dan klasifikasi masalah pendidikan yang sedang dihadapi agar dalam penanganannya tepat sasaran secara efektif dan efisien.

Menurut (Nasir, 2016) menjelaskan pendidikan dalam arti sempit telah terlembagakan dalam institusi-institusi seperti sekolah dan ruang-ruang kelas sehingga berkonsekuensi pada penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasionalisasi pendidikan. Salah satu problem pendidikan yang selalu dikeluhkan adalah dalam hal manajemen pendidikan khususnya pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah. Banyak orang percaya bahwa sarana dan prasarana secara langsung maupun tak langsung akan mempengaruhi mutu pendidikan pada lembaga pendidikan tertentu (Arifudin, 2021). Keluhan tentang sarana dan prasarana pendidikan di pelosok-pelosok Indonesia sering terdengar dan bahkan bersiliweran di media sosial terutama di daerah Terdepan, Terluar, Terbelakang (3T). UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 45 juga menyinggung setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Kabupaten Alor sebagai bagian dari propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah 3T yang juga berbatasan laut dengan Negara Republik Demokrat Timor Leste (RDTL) yang mengalami kendala yang sama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Masih ada sekolah-sekolah di Alor yang fasilitasnya cukup memprihatinkan. Untuk itulah perlu ada penanganan serius dari Pemerintah, Unit Satuan Pendidikan dan Masyarakat terkait dalam mengelola sarana-prasarana demi mutu pendidikan yang lebih baik. Salah satunya SD Inpres Umapura yang berdasarkan observasi awal di SD Inpres Umapura pada tanggal 11 Desember sampai 12 Desember 2019 ditemukan gejala manajemen sarana dan prasarana yang

belum efektif, hal ini mungkin diakibatkan oleh letak sekolah yang berada di pulau Ternate yakni sebuah pulau kecil yang terletak antara Pulau Alor dan Pulau Pantar serta antara Pulau Buaya dan Pulau Pura. Dengan kondisi geografis seperti inilah, selain harga fasilitas yang mahal juga biaya transportasi menjadi mahal dan berdampak pada proses pengadaan fasilitas di SD Inpres Umapura. Selain itu juga diduga karena manajemen personalia yang belum begitu baik terutama dalam pengelolaan sarana prasarana sekolah. Contoh sarana yang belum dimanfaatkan secara baik penggunaan media pembelajaran misalnya Infocus, alat peraga, dan lainnya. Contoh lainnya terkait ketersediaan air yang sulit membuat proses membangun bangunan sekolah tambahan atau rehab menjadi ikut terkendala dan tentu ikut menambah pembengkakan biaya pembangunan gedung sekolah. Selain menghambat proses bangun sekolah, masalah kekurangan air juga bisa menjadi penghambat kurangnya pemanfaatan prasarana misalnya untuk pembelajaran IPA.

PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 point 8 mendefinisikan standar sarana prasarana dengan kriteria sarana prasarana sekolah minimal dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Masih dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 pada pasal 42 berbunyi Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (ayat 1), serta Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (ayat 2). Sementara di pasal 42 tentang sarana Setiap institusi pendidikan yang diharuskan lengkap demi kelangsungan KBM secara teratur dan berkelanjutan (ayat 1), serta pada ayat 2 terkait prasarana tiap sekolah mempunyai lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, dan sebagainya demi mendukung pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Selanjutnya diperkuat lagi Permednknas RI No 24 Tahun 2007 terkait sarpras untuk SD/MI minimal ada ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang beribadah, UKS, WC, gudang, sirkulasi serta taman bermain/ berolahraga.

Kriteria atau standar ini adalah standar minimum yang harus dimiliki Sekolah Dasar seperti SD Inpres Umapura meski berlokasi di sebuah pulau kecil bernama Ternate. Untuk memenuhi harapan dalam standar ini maka diperlukan kepemimpinan dan manajemen yang baik dari kepala sekolah dan seluruh jajaran terkait. (Barnawi, 2012) mengulas manajemen sarana dan prasarana meliputi langkah-langkah perencanaan; pengadaan; pengaturan; penggunaan; dan penghapusan, Alur manajemen ini akan dilihat bagaimana sistem perencanaan sarana dan prasarana? Proses pengadaannya dan pengaturannya seperti apa? Bagaimana mekanisme penggunaannya serta apakah ada proses penghapusan sarana dan prasarana?. Setelah diketahui kondisi pengelolaannya, maka akan diberikan rekomendasi-rekomendasi efektif dan efisien untuk memperbaiki sistem manajemen sarana dan prasarana sekolah guna mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Berbasis teori Barnawi dan M. Arifin inilah dilakukan riset evaluasi terhadap pengelolaan sarana dan prasarana di SD Inpres Umapura.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (*Field Research*). Oleh karena itu, obyek-obyek penelitian adalah berupa obyek di lapangan yang mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian. Penelitian yang dilakukan pada manajemen sarana prasarana SD Inpres Umapura menggunakan pendekatan kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara holistic (menyeluruh) (Rahayu, 2020). Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, sementara objeknya yaitu pengelolaan sarana dan prasarana yang diberlakukan di SD Inpres Umapura, penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi menurut Arikunto dalam (Arifudin, 2018) bahwa merupakan suatu pengamatan

secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian. Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang manajemen sarana prasarana SD Inpres Umapura.

2. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya, pertanyaan disusun secara ketat dan pertanyaan sama pada setiap subjek (Sugiyono, 2015).

3. Dokumentasi

Menurut Moleong dalam (Nasser, 2021) bahwa dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu keberadaan sekolah, keadaan guru, dan keadaan stafnya. Menurut Muhadjir dalam (Hanafiah, 2021) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Bahri, 2021) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Total perhitungan dari hasil pengamatan dan pencermatan terkait manajemen sarana prasarana SD Inpres Umapura dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Persentasi pengamatan dan pencermatan manajemen sarana prasarana SD Inpres Umapura

Fungsi	Pengamatan %	Pencermatan %	total	Rata-rata	Kategori
Perencanaan	0%	73,6%	73,6 %	73,6 %	Cukup
Pengadaan	62,5%	87,5%	150 %	75%	Cukup
Pengaturan	75%	58,3%	133,3%	66,6 %	Cukup
Penggunaan	68,75 %	62,5%	131,25%	65,6 25%	Cukup
Penghapusan	0%	25%	25%	25%	Tidak Baik

Melihat hasil wawancara terkait proses manajemen sarana prasarana di SD Inpres Umapura dapat ditemukan bahwa mulai dari perencanaan, pengadaan, pengaturan memiliki mutu yang cukup baik meski belum 100% dijalankan dengan baik. Sementara yang prosesnya tidak berjalan dengan baik adalah proses penghapusan sarana prasarana sekolah karena hanya dibiarkan begitu saja.

A. Perencanaan

Tahapan perencanaan sesuai dengan kisi-kisi instrumen lembar pengamatan dan pencermatan maka diketahui lembar pengamatan nilainya 0% karena tidak ada pertanyaan dalam lembar pengamatan, artinya ini tidak dihitung ke dalam perhitungan rata-rata bersama nilai % pencermatan dokumen. Sementara nilai pencermatan dokumen adalah 73,6% dengan kategori baik. Jika dilihat dari hasil wawancara cukup sinergis karena memang ada dokumen usulan pengadaan sarana prasarana yang disusun bersama kepala sekolah, wakil kepala, para guru dan komite. Di dalam usulan memang ada Rancangan Anggaran Biaya (RAB) karena memang ada anggaran untuk itu. Sekolah juga pernah mengirim utusan guru untuk mengikuti pelatihan khusus untuk pengadaan sarana prasarana.

B. Pengadaan

Pada tahapan pengadaan terlihat dari hasil pengamatan berjumlah 62,5% dengan kategori cukup baik, sementara dari pencermatan diperoleh persentasi sebesar 87,5% dengan kategori baik. Rata-rata dari keduanya adalah 75% dalam kategori cukup baik. Hal ini

sesuai keterangan interview bahwa pengadaan sarana prasarana disesuaikan berdasarkan kebutuhan sekolah dan dalam proses pengadaan kepala sekolah cukup memberikan pengarahan dan motivasi kepada tim.

C. Pengaturan

Data hasil pengamatan dalam dimensi pengaturan sarana prasarana hasil pengamatan dalam skala 65,625% atau terkonfirmasi kategori cukup baik, sementara dalam pencermatan hanya 66,66% dalam kategori cukup baik. Rata-rata dari keduanya dalam fungsi pengaturan adalah 66,14% atau dikatakan cukup baik. Hal ini sesuai interview yang dilakukan pada kepala SD Inpres Umapura yang menggambarkan mekanisme pengaturan pengadaan sarpras sekolah cukup terbuka yang juga dikontrol cukup ketat oleh kepala sekolah melalui bendahara lalu barang itu dimasukkan ke dalam RKS. Masing-masing unit bertanggung jawab terhadap fasilitas yang berada dalam kewenangannya. Beberapa kekurangan seperti belum ada fasilitas olahraga (bulu tangkis, voli) dan taman baca. Kepala sekolah mencontohkan jika menggunakan dana bos itu target pada waktunya sekitar 4 bulan kalau menggunakan dana komite itu 6 bulan lamanya.

D. Penggunaan

Dalam fungsi penggunaan, diketahui pengamatan berada pada angka 68,75% atau disebut kategori cukup baik, sementara dalam lembar pencermatan dokumen hanya 65,625% atau kategori cukup baik. Dengan rata-rata adalah 67,18 atau dalam kategori cukup baik. Hasil ini cocok dengan hasil wawancara bersama kepala sekolah yang mendeskripsikan bahwa penggunaan sarana prasarana belum 100% berjalan dengan baik. Sarana prasarana selama ini bertahan lama karena penggunaan dilakukan cukup baik sesuai prosedur yang ada. Sarana prasarana dalam penggunaan memberikan kontribusi bagi jalannya aktivitas pendidikan sekolah khususnya kegiatan belajar mengajar (Nanik, 2006). Beberapa fasilitas seperti meja, kursih, papan tulis mengalami kerusakan ringan karena kenakalan siswa/I saat kegiatan pembelajaran di kelas/sekolah.

E. Penghapusan

Dalam dimensi penghapusan, dilihat bahwa nilai pengamatan 0% karena dalam kisi-kisi instrumen tidak ada pertanyaan untuk hal ini. Sementara dalam dimensi pencermatan hanya di angka 25% atau

terkategori tidak baik. Demikian juga dalam kisi-kisi wawancara tidak ada pertanyaan wawancara dalam dimensi penghapusan. Dokumen-dokumen yang dicek ternyata untuk urusan penghapusan tidak begitu diperhatikan atau belum melalui prosedur yang sesuai. Fasilitas yang rusak atau sudah selesai masa penggunaan hanya dibiarkan begitu saja atau sekedar dalam gudang penyimpanan, melihat hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa ke-empat fungsi manajemen atau boleh dikatakan tahapan-tahapan pengelolaan sarana prasarana SD Inpres Umapura tergolong cukup baik. Sementara dalam hal tahapan penghapusan masih tergolong tidak baik.

Evaluasi ini dilakukan terhadap sebuah proses program pendidikan yang berlangsung cukup lama sebagaimana (Arikunto, 2012) memberikan 3 pengertian terkait evaluasi/ sistem seperti manajemen sarana prasarana yaitu: (1) realisasi sebuah kebijakan, (2) terjadi dalam waktu lama, jamak dan berkelanjutan, (3) terjadi pada suatu organisasi serta pelibatan banyak orang/ kelompok. Dengan demikian maka perlu dirumuskan lagi rekomendasi berdasarkan kekurangan dan kelebihan untuk perbaikan sistem manajemen sarana prasarana sekolah yang berkelanjutan dan dalam waktu lama. Poin 3 di atas mengenai terjadi dalam organisasi seperti sekolah (SD Inpres Umapura) yang sudah diteliti manajemen sarana prasarannya. Pada poin 1 di atas terkait implementasi/realisasi suatu kebijakan dilakukan untuk melihat apakah kebijakan manajemen sarana prasarana sudah berlangsung dengan baik sesuai harapan atau tidak (Sukardi, 2012). Kenyataannya masih didominasi dalam kategori cukup baik, bahkan ada tahapan yang terkategori tidak baik seperti tahapan penghapusan.

Jika dikontekskan hasil riset ini dengan riset (Fardiyono, 2015) tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SD Kanisius Eksperimental (SDKE) maka ada sedikit perbedaan yakni dari hasil penelitian yang melibatkan yayasan dalam manajemen sarana prasarana sementara SD Inpres Umapura tidak menggunakan yayasan karena bukan sekolah swasta. Proses inventaris di SD Kanisius lebih terarah disesuaikan dengan pedoman Dirjend Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas 2007 sementara SD Inpres Umapura belum mengarah kesana. Kalau perbandingannya dengan

riset dari (Indah, 2014) tentang perencanaan dan pengadaan Sarpras SDN 2 Curup Timur terlihat ada kemiripan kualitas manajemen sarana prasarana sekolah. Namun kajian di SD Inpres Umapura lebih lengkap tahapannya sementara di SDN 2 Curup Timur lebih fokus pada tahapan perencanaan. Perbandingan ini memberikan satu perspektif bahwa manajemen sarana prasarana di SD Inpres Umapura masih harus dibenahi karena belum maksimal sebagaimana yang diharapkan sehingga kepala sekolah mesti lebih ketat dalam pengontrolan manajemen sarana prasarana ini sembari memperkuat pemahaman seluruh warga sekolah tentang pentingnya wawasan manajemen sarana prasarana sekolah bagi keberlanjutan berbagai aktivitas akademik maupun non akademik di SD Inpres Umapura.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah melihat hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut : 1) Mutu perencanaan sarana dan prasarana di SD Inpres Umapura tergolong cukup baik, 2) Mutu pengadaan sarana dan prasarana di SD Inpres Umapura tergolong cukup baik, 3) Mutu pengaturan sarana dan prasarana di SD Inpres Umapura terkategori cukup baik, 4) Mutu penggunaan sarana dan prasarana di SD Inpres Umapura terkategori cukup baik, dan 5) Mutu penghapusan sarana dan prasarana di SD Inpres Umapura terkategori tidak baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagaimana berikut:

1. Manajemen sarana prasarana di SD Inpres Umapura dalam tahapan perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan tergolong cukup baik sehingga perlu ada peningkatan pada tahap ini. Peningkatan pada tahapan-tahapan ini harus dikoordinir secara ketat oleh kepala sekolah dalam memperbaiki kekurangannya.
2. Manajemen sarana prasarana di SD Inpres Umapura dalam tahapan penghapusan tergolong tidak baik sehingga hal ini harus menjadi prioritas untuk diperbaiki minimal ke arah kategori cukup baik.
3. Pengambil kebijakan di level atas seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Alor harus selalu memberikan pembinaan, pemanta-

uan, memberi bantuan proses manajemen sarana prasarana di Sekolah Dasar yang berada di daerah kepulauan agar dapat meningkatkan kualitasnya.

4. Bagi para peneliti lanjutan dapat mengambil ruang kosong dari penelitian ini untuk dijadikan penelitian lanjutan dalam topik manajemen sarana prasarana SD misalnya untuk tiap-tiap tahapan atau fungsi manajemen sarana prasarana SD.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifudin, O. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan STIT Rakeyan Santang Karawang. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(3), 209–218.
- Arifudin, O. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Arikunto. (2012). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta : Aditya Media & FIP UNY.
- Bahri, A. S. (2021). *Pengantar Penelitian Pendidikan (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Barnawi. (2012). *Manajemen Sarana & Prasarana Sekolah*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Fardiyono. (2015). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah Dasar Kanisius Eksperimental (SDKE) Mangunan*. Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY.
- Hanafiah. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213–220.
- Imansyah, M. Nur, and Asmedy Asmedy. "Akselerasi covid-19 pada proses pembelajaran di era pendidikan 4.0." *JPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 7.2 (2021): 279-284.
- Indah. (2014). *Peranan Sarana dan Prasarana Pendidikan Guna Menunjang Hasil Belajar Siswa di SD Islam Al Syukro Universal*. Yogyakarta: FITK UIN Sunan Kalijaga.
- Irwansyah, R. (2021). *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Nanik. (2006). *Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan, Bahan Ajar Diklat Sekolah Dasar*. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pusat Pengembangan dan Panataran Guru IPS dan PMP Malang.
- Nasir. (2016). *Education Based Culture in Globalization Era, Case The Indonesian Context. Proceeding International Joint Seminar The Contribution of Education Institution to ASEAN Economic Community*. Johor Bahru: Universitas Teknologi Malaysia & Universitas Ahmad Dahlan.
- Nasser, A. A. (2021). Sistem Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Dalam Meningkatkan Mutu Siswa Di Era Pandemi. *Biomatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 7(1), 100–109.
- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sukardi. (2012). *Evaluasi Pendidikan Prinsip Operasionalnya*. Jakarta : Bumi Aksara.